

BAB I

PENDAHULUAN

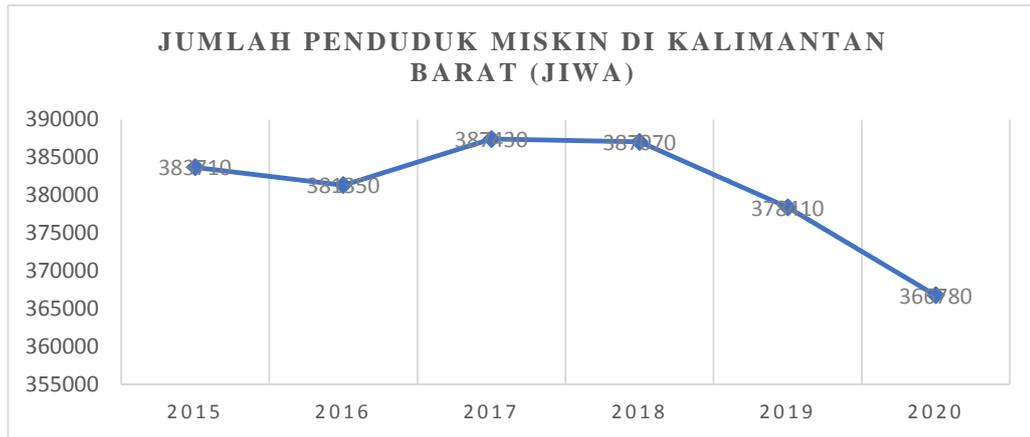
1.1. Latar Belakang

Salah satu ujuan utama suatu daerah dalam membangun kemajuan daerahnya adalah dengan mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu (World Bank, 2002).

Setiap pemerintah daerah bertujuan agar otonomi daerahnya dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan yang baik, pemberdayaan dan ada peran masyarakat. Kemiskinan merupakan hal pengganggu daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerahnya berusaha untuk mengatasi kemiskinan.

Dampak dari pada kemiskinan itu sendiri terlihat sangat jelas berupa kesenjangan dalam kehidupan masyarakat suatu daerah, sehingga diperlukannya kebijakan untuk menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan.

Kalimantan Barat adalah Provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan terdiri dari Pemerintahan Admisnistatif 12 kabupaten dan 2 kota. Jumlah penduduknya sebesar 5.069.127 jiwa, dengan latar belakang mata pencaharian penduduknya berprofesi sebagai petani yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, perikanan dan pemungutan hasil hutan. Dari mata pencaharian penduduk Kalimantan Barat didapatkan data kemiskinannya yaitu jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinannya. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat.



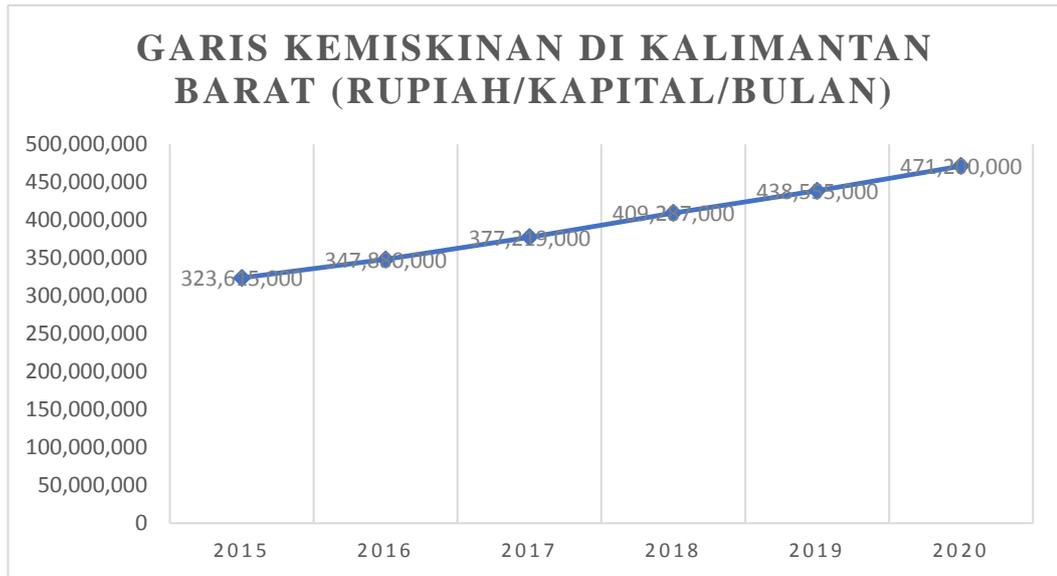
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Barat

Dapat kita lihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami naik turun pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 merupakan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 387.430 ribu jiwa selama kurun waktu 2015-2020. Tahun 2020 merupakan tingkat kemiskinan terendah yaitu 366.780 ribu jiwa. Rata-rata jumlah penduduk miskin di Kalimantan barat pada tahun 2015-2020 sebesar 1.979.100 ribu jiwa.

Selanjutnya, garis Kemiskinan atau juga yang disebut batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. (Wikipedia, 2017).



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Gambar 1.2 Garis Kemiskinan di Kalimantan Barat

Dapat kita lihat dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat garis kemiskinan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020 merupakan tingkat garis kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 471.200.000 jiwa selama kurun waktu 2015-2020. Tahun 2015 merupakan tingkat garis kemiskinan terendah yaitu 323.615.000 jiwa. Rata-rata garis kemiskinan di Kalimantan barat pada tahun 2015-2020 sebesar 1.975.089.333 jiwa.

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom(Provinsi/Kabupaten/Kota) Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90% (Wikipedia, 2021)



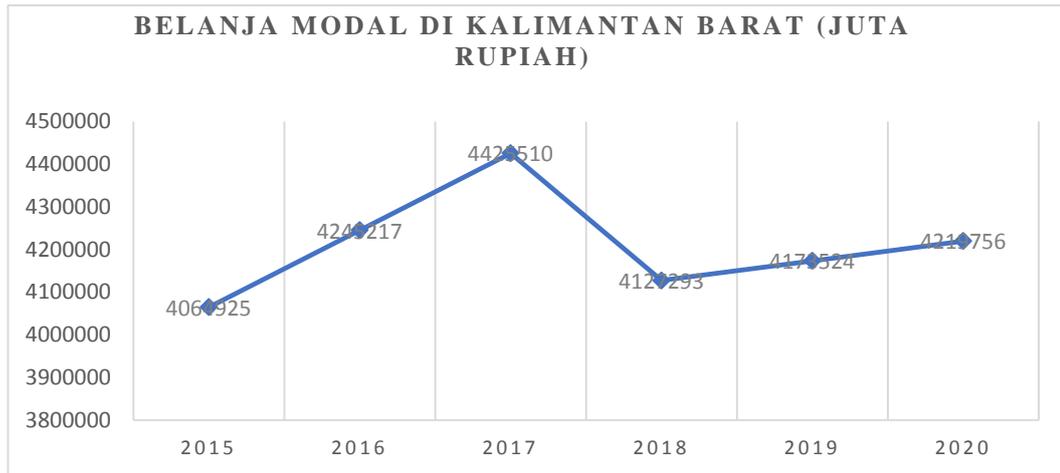
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Gambar 1.3 Dana Alokasi Umum di Kalimantan Barat

Pada tahun 2020 merupakan tingkat dana alokasi umum tertinggi yaitu sebesar 10.373.676 selama kurun waktu 2015-2020. Tahun 2015 merupakan tingkat dana alokasi umum terendah yaitu 9.422.549 Rata-rata jumlah dana alokasi umum di Kalimantan barat pada tahun 2015-2020 sebesar 51.325.256,68 juta rupiah.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengertian belanja modal adalah suatu pengeluaran ataupun pembiayaan yang dibutuhkan untuk bisa membentuk modal dengan cara mengadakan, membeli, ataupun membangun suatu aset yang mempunyai nilai lebih dari satu tahun periode akuntansi.

Lalu, dengan cara memperhatikan informasi yang terdapat di dalam buku besar, maka perusahaan bisa lebih mudah lagi dalam mengelola setiap kegiatan transaksi pengeluaran dan pemasukan. Dalam hal, pengeluaran tersebut meliputi kegiatan penambahan belanja yang sifatnya rutin dan juga biaya pemeliharaan yang sifatnya lebih mempertahankan ataupun menambah masa manfaat (Accurate, 2021).

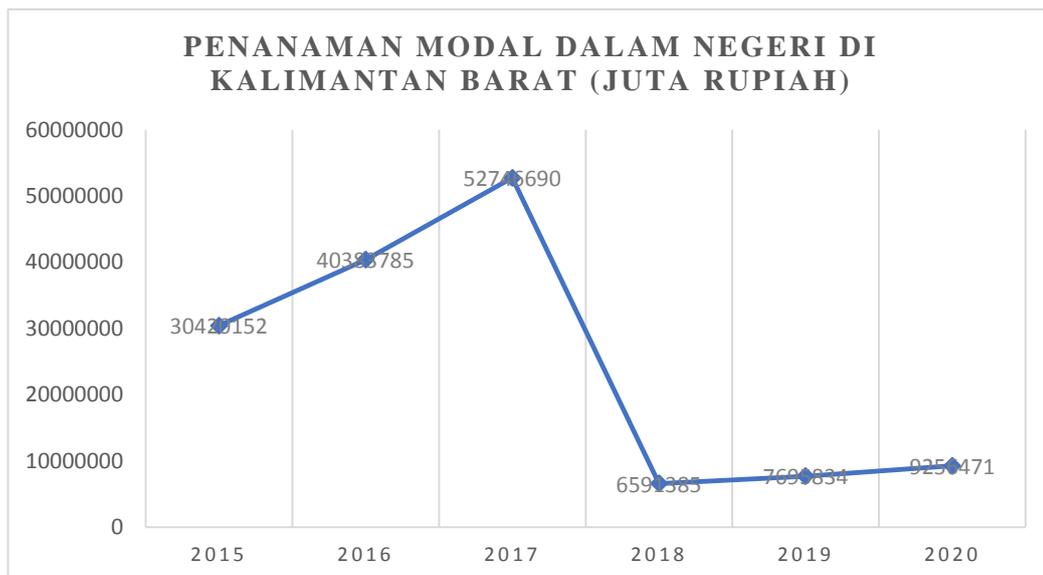


Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Gambar 1.4 Belanja Modal Provinsi Kalimantan Barat

Pada tahun 2017 merupakan tingkat Belanja Modal tertinggi yaitu sebesar 4.225.510 selama kurun waktu 2015-2020. Tahun 2015 merupakan tingkat Belanja Modal terendah yaitu 4.064.925. Rata-rata jumlah Belanja Modal di Kalimantan barat pada tahun 2015-2020 sebesar 21.739.761,68 juta rupiah.

Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut. Seperti pemerintah, badan usaha negeri, dan perorangan (Warga Negara Indonesia), yang melakukan penanaman modal di seluruh wilayah Republik Indonesia (Wikipedia, 2020).

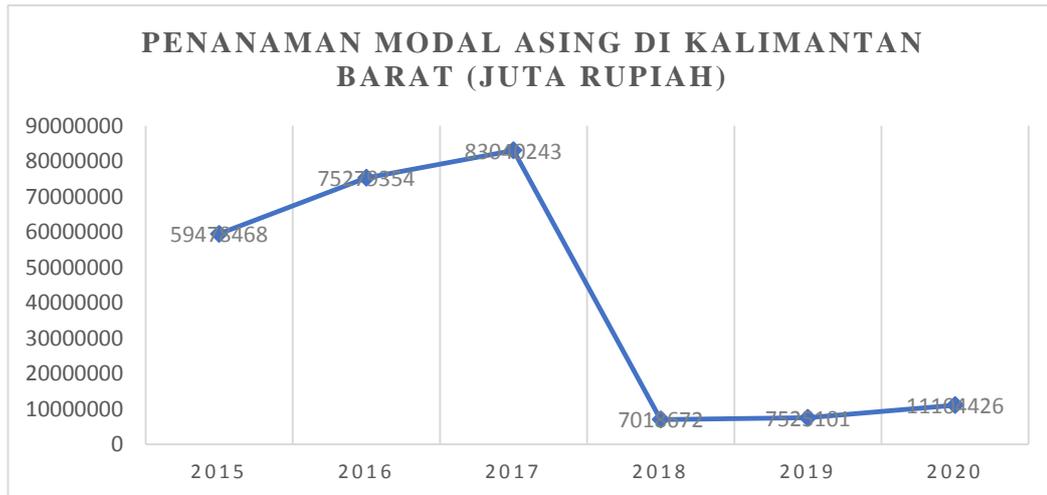


Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Gambar 1.5 Penanaman Modal Dalam Negeri di Kalimantan Barat

Pada tahun 2017 merupakan tingkat PMDN yaitu sebesar 52.764.690 selama kurun waktu 2015-2020. Tahun 2018 merupakan tingkat PMDN terendah yaitu 6.591.385 Rata-rata jumlah PMDN di Kalimantan barat pada tahun 2015-2020 sebesar 139.380.531.168 juta rupiah.

Penanaman Modal Asing atau yang biasa disebut PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. PMA juga merupakan salah satu cara agar para investor luar dapat berinvestasi dengan cara membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Semua peraturan mengenai PMA telah diatur dalam Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (izin.co.id, 2021).



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Gambar 1.6 Penanaman Modal Asing di Kalimantan Barat

Pada tahun 2017 merupakan tingkat tertinggi PMA yaitu sebesar 83.040.243 selama kurun waktu 2015-2020. Tahun 2018 merupakan tingkat PMDA terendah yaitu 7.018.672. Rata-rata jumlah PMA di Kalimantan barat pada tahun 2015-2020 sebesar 234.192.575,68 juta rupiah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis berniat untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat“.

1.2 Rumusan masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Penelitian ini untuk melihat pengaruh sub Determinan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat, kemudian pengaruh sub Determinan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat, selanjutnya pengaruh sub Determinan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat dan pengaruh sub Determinan Penanaman Modal Asing terhadap Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap angka Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat ?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap angka Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat ?
3. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap angka Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat ?
4. Apakah Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap angka Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap angka Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap angka Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap angka Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap angka Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan teori yang ada bagi akademisi dan peneliti, khususnya mengenai kebijakan otonomi daerah di provinsi Kalimantan Barat.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi para pengambil keputusan kebijakan otonomi di kab/kota provinsi Kalimantan barat untuk menentukan kemajuan daerahnya.

1.5. Gambaran Kontekstual Penelitian

Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU serta 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah pertama Irian Jaya (421.891 km²), kedua Kalimantan Timur (202.440 km²) dan ketiga Kalimantan Tengah (152.600 km²). Dilihat dari luas

menurut Kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (35.809 km² atau 24,39 persen) kemudian diikuti Kapuas Hulu (29.842 km² atau 20.33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km² atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya.